BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan

PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2019) menyatakan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang dan rencana pada waktu yang akan datang. Dalam pengertian sederhana menurut Kasmir (2020, hal. 7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Susilo (2009, hal. 10) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang memuat informasi-informasi dan memberikan keterangan-keterangan mengenai data ekonomi perusahaan yang terdiri dari daftar-daftar yang menunjukan posisi keuangan dan hasil kegiatan perusahaan untuk satu periode yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan keuangan.

Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi (hasil usaha) perusahaan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2019) menyatakan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Mait, 2013).

2.2 Fungsi Laporan Keuangan

Pada awalnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanya sebagai alat penguji dan pekerjaan pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagal alat penguji tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan, dimana dengan hasil analisa lapran keuangan, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. Laporan keuangan suatu perusahaan dapat memberikan suatu informasi yang bermanfaat bagi pemakainya, jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Prinsip Akuntansi Indonesia) yaitu sebagai berikut :

1. Relevan

   Pengukuran relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan penggunaannya. OIeh karena dalam mempertimbangkan relevansi suatu informasi hendaknya perhatian difokuskan pada kebutuhan umum pemakai dan bukan kebutuhan khusus pihak tertentu.

2. Dapat Dimengerti

   Bentuk laporan keuangan dan istilah yang dipakai hendaknya disesuaikan dengan batas pengertian pemakai informasi juga diharapkan mempunyai dasar pengertian mengenai aktivitas ekonomi perusahaan, proses akuntansi dan istilah yang digunakan dalam laporan keuangan.

3. Objektif

Laporan keuangan harus disusun seobjektif mungkin, dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dan menggunakan metode pengukuran yang sama.

4. Netral

   Laporan keuangan hendaknya disusun untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan kebutuhan pihak tertentu saja.

5. Tepat Waktu

   Laporan keuangan harus disampaikan secara sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertunda pengambilan keputusan bagi pemakai

6. Dapat Dibandingkan

   Laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama maupun dengan perusahaan yang sejenis pada periode yang sama. Prinsip konsisten (penggunaan model) akuntansi hendaknya selalu dipatuhi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan metode hendaknya diberikan penjelasan metode yang diganti/diubah.

7. Lengkap

   Laporan keuangan hendaknya disajikan secara lengkap meliputi semua data akuntansi yang memenuhi sekurang-kurangnya enam persyaratan tersebut.

2.3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan UU No. 19 tahun

2003 Pasal 1 BUMN adalah “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan” (UU No. 19 tahun 2003 Pasal 1). Tujuan pendirian BUMN menurut UU No. 19 tahun 2003 pasal 2 adalah:

1) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
2) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
3) Mengejar keuntungan;
4) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
5) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

Berdasarkan UU No. 19 tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdiri dari 2 jenis, yaitu:

1. Perusahaan Perseroan (Persero)

   Perusahaan Perseroan (Persero) merupakan BUMN yang berbentuk perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Perseroan Terbuka yang selanjutnya disebut Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Tujuan didirikannya Persero adalah:

a. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; dan

b. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

2. Perusahaan Umum (Perum)

   Perusahaan umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Perum bertujuan untuk kemanfaatan umum yaitu berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

2.4 Analisis Rasio Keuangan

Dalam pengukuran kinerja keuangan, perusahaan dapat menggunakan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan mempunyai tujuan, kegunaan dan arti tertentu. Hasil dari setiap rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Macam-macam rasio keuangan adalah sebagai berikut:

1. **Rasio Likuiditas** *(Liquidity Ratio*) adalah mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo, dapat memelihara modal kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional membayar bunga tiap jatuh tempo.
2. **Rasio Solvabilitas (***Leverage Ratio***)** adalah mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau dengan kata lain mengukur

perbandingan antara dana yang disiapkan oleh pemilik dengan dana yang berasal dari pihak luar atau pihak kreditor.

3. **Rasio Aktivitas** (*Activity Ratio*) adalah yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dengan investasi pada beberaapa jenis aktiva.
4. **Rasio Profitabilitas** (*Profitability Ratio*) adalah yang mengukur tingkat efektivitas manajemen yang ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dalam penjualan dan investasi perusahaan.
5. **Rasio Pertumbuhan** (*Growth Ratio*) adalah yang mengukur kemampuan perusahaaan dalam mempertahankan posisi ekonomi di dalam pertumbuhan ekonomi dan industri.
6. **Rasio Penilaian** *(Valuation Ratio)* adalah yang mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran biaya investasi (Kasmir, 2020).

2.5 Tingkat Kesehatan BUMN

Berbeda dengan perusahaan swasta, BUMN memiliki pedoman yang mengatur penilaian tingkat kesehatan BUMN yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No: Kep-100/MBU/2002. Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi:

1. **Aspek Keuangan** yang terdiri atas penilaian terhadap delapan rasio yaitu Imbalan kepada pemegang saham (ROE), Imbalan Investasi (ROI), Rasio

Kas, Rasio Lancar, *Colection Periods*, Perputaran persediaan, Perputaran total asset, Rasio modal sendiri terhadap total aktiva.

2. **Aspek Operasional** yang meliputi unsur dari kegiatan-kegiatan yang dianggap dominan dalam menunjang keberhasilan operasional perusahaan sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki perusahaan.
3. **Aspek Administrasi** penilaian dilakukan dengan memuat 4 indikator yaitu laporan perhitungan tahunan, rancangan Rencana Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), laporan periodik dan kinerja PKBL.

Setelah melakukan penilaian terhadap tiga aspek di atas kemudian hasilnya akan dimasukkan kedalam penggolongan tingkat kesehatan BUMN sesuai dengan SK Menteri BUMN No: Kep-100MBU/2002 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kategori Tingkat Kesehatan BUMN Berdasarkan SK Menteri BUMN No: Kep-100MBU/2002

Tingkat Kesehatan Perusahaan		
Kategori	**Predikat**	**Nilai (Skor)**
Sehat	AAA	>95
Sehat	AA	80 < TS ≤ 95
Sehat	A	65 < TS ≤ 80
Kurang Sehat	BBB	50 < TS ≤ 65
Kurang Sehat	BB	40 < TS ≤ 50
Kurang Sehat	B	30 < TS ≤ 40
Tidak Sehat	CCC	20 < TS ≤ 30
Tidak Sehat	CC	10 < TS ≤ 20
Tidak Sehat	C	TS ≤ 10

Sumber: SK Menteri BUMN No: Kep-100/MBU/2002, 2021

Penilaian tingkat kesehatan keuangan BUMN yang diukur berdasarkan aspek keuangan mengunakan total bobot penilaian berasarkan hasil bobot dari 8

indikator. Total bobot dan indikator yang digunakan dalam penilaian aspek keuangan BUMN non jasa keuagan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Daftar Indikator Dan Bobot Aspek Keuangan

No	Indikator	Bobot	
		Infra	Non Infra
1	Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2	Imbalan investasi (ROI)	10	15
3	Rasio kas	3	5
4	Rasio lancar	4	5
5	*Colection periods*	4	5
6	Perputaran persediaan	4	5
7	Perputaran total aset	4	5
8	Rasio modal sendiri terhadap total aset	6	10
Total Bobot		**50**	**70**

Sumber: SK Menteri BUMN No: Kep-100/MBU/2002, 2021

Total bobot yang diperlukan untuk mengetahui tingkat kesehatan BUMN adalah 100 sedangkan total bobot untuk aspek keuangan BUMN sebesar 50 untuk infrastruktur dan 70 untuk non infrastruktur. Menurut Sutrisno (2013:34) supaya dapat diperoleh hasil akhir untuk mengetahui tingkat kesehatan BUMN, maka bobot dari aspek keuangan dibuat hasil ekuivalennya. Cara membuat aspek keuangan agar ekuivalen adalah dengan membagi hasil akhir bobot penilaian dari delapan rasio dengan 50% untuk BUMN infrastuktur dan 70% untuk BUMN non infrastuktur.

Adapun metode penilaian dari setiap indikator adalah sebagai berikut:

1. **Imbalan Kepada Pemegang Saham atau *Return on Equity* (ROE)**

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Laba Setelah Pajak adalah laba setalah pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dan aktiva tetap, non produktif, dan lain-lain serta saham penyertaan langsung.

b. Modal Sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap dalam pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Aktiva tetap dalam pelaksanaan adalah posisi akhir tahun buku aktiva tetap yang sedang dalam pelaksanaan.

Tabel 2.3
Daftar Skor Penilaian ROE

ROE (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE ≤ 15	13,5	18
11 < ROE ≤ 13	12	16
9,0 < ROE ≤ 11	10,5	14
7,9 < ROE ≤ 9	9	12
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5	10
5,3 < ROE ≤ 6,6	6	8,5
4,0 < ROE ≤ 5,3	5	7
2,5 < ROE ≤ 4,0	4	5,5
1,0 < ROE ≤ 2,5	3	4
0,0 < ROE ≤ 1	1,5	2
ROE < 0	1	0

Sumber: SK Menteri BUMN No: Kep-100/MBU/2002, 2021

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10 %, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.

2. Imbalan Investasi atau *Return on Invesment* (ROI)

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{Capital\ Employed} \times 100\%$$

Keterangan:

a. EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari: aktiva tetap, aktiva lain-lain, aktiva non produktif dan saham penyertaan langsung.

b. Penyusutan adalah depresiasi, amortisasi dan deplasi.

c. *Capital Employed* = Total aktiva – Aktiva dalam kontruksi atau pelaksanaan.

Tabel 2.4
Daftar Skor Penilaian ROI

ROI (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI ≤ 18	9	13,5
13 < ROI ≤ 15	8	12
12 < ROI ≤ 13	7	10,5
10.5 < ROI ≤ 12	6	9
9,0 < ROI ≤ 10,5	5	7,5
7,0 < ROI ≤ 9,0	4	6
\5,0 < ROI ≤ 7,0	3,5	5
3,0 < ROI ≤ 5,0	3	4
1,0 < ROI ≤ 3,0	2,5	3
0,0 < ROI ≤ 1,0	2	2
ROI < 0	0	1

Sumber: SK Menteri BUMN No: Kep-100/MBU/2002, 2021

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14 %, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

$$Cash\ Ratio = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Keterangan:

Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku

Tabel 2.5
Daftar Skor Penilaian *Cash Ratio*

Cash Ratio (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
CR ≥ 35	3	5
25 ≤ CR < 35	2,5	4
15 ≤ CR < 23	2	3
10 ≤ CR < 15	1,5	2
5 ≤ CR < 10	1	1
0 ≤ CR < 5	0	0

Sumber: SK Menteri BUMN No: Kep-100/MBU/2002, 2021

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki *cash ratio* sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5

4. Rasio Lancar atau *Current Ratio*

$$Current\ Ratio = \frac{Current\ Asset}{Current\ Liabilities} \times 100\%$$

Keterangan:

a. *Current Asset* adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku

b. *Current Liabilities* adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku

Tabel 2.6
Daftar Skor Penilaian *Current Ratio*

Current Ratio (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
125 ≤ CR	3	5
110 ≤ CR < 125	2,5	4
100 ≤ CR < 110	2	3
95 ≤ CR < 100	1,5	2
90 ≤ CR < 95	1	1
≤ CR < 90	0	0

Sumber: SK Menteri BUMN No: Kep-100/MBU/2002, 2021

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115 %, maka sesuai tabel 5 skor untuk Indikator Current Ratio adalah 4

5. *Collection Periods* (CP)

$$Collection\ Periods = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365\%$$

Keterangan:

a. Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.

b. Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

Tabel 2.7
Daftar Skor Penilaian *Collection Periods*

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x < 60	x > 35	4	5

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
60 < x < 90	30 < x < 35	3,5	4,5
90 < x < 120	25 < x < 30	3	4
120 < x < 150	20 < x < 25	2,5	3,5
150 < x < 180	15 < x < 20	2	3
180 < x < 210	10 < x < 15	1,6	2,4
210 < x < 240	6 < x < 10	1,2	1,8
240 < x < 270	3 < x < 6	0,8	1,2
270 < x < 300	1 < x < 3	0,4	0,6
300 < x	0 < x < 1	0	0

Sumber: SK Menteri BUMN No: Kep-100/MBU/2002, 2021

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat *Collection Periods* : 4
- Perbaikan *Collection Periods* (7 hari): 1,8
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu 4

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki *Collection Periods* 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat *Collection periods* : 1,2
- Perbaikan *Collection periods* (32 hari) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

6. Perputaran Persediaan (PP)

$$\text{PP} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365\%$$

Keterangan:

a. Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.

b. Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan

Tabel 2.8
Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x < 60	x > 35	4	5
60 < x < 90	30 < x < 35	3,5	4,5
90 < x < 120	25 < x < 30	3	4
120 < x < 150	20 < x < 25	2,5	3,5
150 < x < 180	15 < x < 20	2	3
180 < x < 210	10 < x < 15	1,6	2,4
210 < x < 240	6 < x < 10	1,2	1,8
240 < x < 270	3 < x < 6	0,8	1,2
270 < x < 300	1 < x < 3	0,4	0,6
300 < x	0 < x < 1	0	0

Sumber: SK Menteri BUMN No: Kep-100/MBU/2002, 2021

Contoh Perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infra struktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai dengan tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

7. Perputaran Total Asset atau *Total Asset Turn Over* (TATO)

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap

b. *Capital Employed* adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan

Tabel 2.9
Daftar Skor Penilaian Perputaran *Total Asset atau Total Asset Turn Over*

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
120 < x	20 < x	4	5
105 < x < 120	15 < x < 20	3,5	4,5
90 < x < 105	10 < x < 15	3	4
75 < x < 90	5 < x < 10	2,5	3,5

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
60 < x < 75	0 < x < 5	2	3
40 < x < 60	x < 0	1,5	2,5
20 < x < 40	x < 0	1	2
x < 20	x < 0	0,5	1,5

Sumber: SK Menteri BUMN No: Kep-100/MBU/2002, 2021

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 70% dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

Contoh 2:

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 108 % dan pada tahun 1998 sebesar 98%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3,5
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 2,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

8. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

$$T\text{MS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.

b. Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 2.10
Daftar Skor Penilaian TMS terhadap TA

TMS thd TA (%) = x	Skor	
	Infra	Non Infra
x < 0	0	0
0 < x < 10	2	4
10 < x < 20	3	6
20 < x < 30	4	7,25
30 < x < 40	6	10
40 < x < 50	5,5	9
50 < x < 60	5	8,5
60 < x < 70	4,5	8
70 < x < 80	4,25	7,5
80 < x < 90	4	7
90 < x < 100	3,5	6,5

Sumber: SK Menteri BUMN No: Kep-100/MBU/2002, 2021

Contoh perhitungan:

PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35 %, maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.

2.6 Analisis *Trend*

Menurut Mahmudi (2012, hal 89) mendefinisikan analisis trend adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Harahap (2011, hal 244) mendefinisikan analisis trend bertujuan untuk mengetahui tendensi atau

kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang baik kecenderungan naik, turun maupun tetap. Analisis *trend* dalam kinerja keuangan adalah analisis yang berguna untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan dengan cara membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Penelitian ini akan menganalisis *trend* perkembangan setiap indikator rasio keuangan perusahaan PT. Garam (Persero) periode 2016-2019.

Metode yang dapat digunakan untuk analisis trend adalah metode Garis Linear Secara Bebas (*Free Hand Method*) yang mana metode ini adalah metode untuk menentukan *trend* dengan menciptakan sebuah garis *trend* sesuai dengan apa yang dilihat (Subagyo, 2018).